



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG
PEMANFAATAN TANAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa mengenai pemanfaatan tanah desa;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penyusunan dan keseragaman pelaksanaan Peraturan Desa mengenai pemanfaatan tanah desa diperlukan Peraturan Gubernur sebagai pedoman penyusunan Peraturan Desa mengenai pemanfaatan tanah desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dinas Provinsi adalah perangkat daerah DIY yang memiliki tugas di bidang pertanahan.
3. Dinas Kabupaten adalah perangkat daerah kabupaten yang memiliki tugas di bidang pertanahan.
4. Tanah Desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak Anggaduh, yang jenisnya terdiri dari Tanah Kas Desa, Pelungguh, Pengarem-Arem, dan tanah untuk kepentingan umum.

5. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa bersama BPD menyusun Peraturan Desa mengenai pemanfaatan tanah desa.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk Peraturan Desa mengenai pemanfaatan tanah desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa mengenai pemanfaatan tanah desa yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD disampaikan oleh Kepala Desa kepada Dinas Kabupaten untuk dilakukan evaluasi.

- (2) Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat substansi materi pengaturan yang perlu diperbaiki, Dinas Kabupaten menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Desa dimaksud kepada Kepala Desa untuk dilakukan perbaikan bersama BPD.

Pasal 4

- (1) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa mengenai pemanfaatan tanah desa kepada Dinas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disertai dengan surat pernyataan yang berisi :
 - a. luas Tanah Desa;
 - b. keterangan penggunaan Tanah Desa;
 - c. keterangan pelepasan Tanah Desa; dan
 - d. keterangan terkait Tanah Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan.
- (2) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa mengenai pemanfaatan tanah desa yang telah dievaluasi oleh Dinas Kabupaten disampaikan kepada Dinas Provinsi untuk dilakukan klarifikasi.
- (2) Apabila berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat substansi materi pengaturan yang perlu diperbaiki, Dinas Provinsi menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Desa dimaksud kepada Dinas Kabupaten untuk dilakukan perbaikan.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa mengenai pemanfaatan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dinas Provinsi menyampaikan Rancangan Peraturan Desa mengenai pemanfaatan tanah desa yang telah lulus klarifikasi kepada Dinas Kabupaten.
- (2) Dinas Kabupaten menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Juni 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA
TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA

BENTUK FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA



KEPALA DESA ... (Nama Desa)
KABUPATEN ... (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA ... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN 2019
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH DESA ... (Nama Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- KEPALA DESA ... (Nama Desa),
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (6) huruf c, Pasal 37 ayat (3), Pasal 40 ayat (2) huruf c, dan Pasal 42 ayat (4) huruf b Peraturan Gubernur Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa ... (Nama Desa);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA ... (Nama Desa.)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Tanah Desa adalah tanah hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Desa berdasarkan hak *anggaduh*, meliputi Tanah Kas Desa, *Pelungguh* dan *Pengarem-arem*.
2. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa.
3. *Pelungguh* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. *Pengarem-arem* adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Perangkat Desa yang purna tugas.
5. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.
6. Masyarakat adalah orang perorangan, badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
7. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
8. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
9. Bupati adalah Bupati Kabupaten....
10. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan.
11. Desa adalah Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten....
12. Pemerintah Desa adalah Kepala/Lurah Desa dibantu Pamong/Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala/Lurah Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa....
15. Pamong/Perangkat Desa adalah Carik, Kepala-Kepala urusan, kepala-Kepala Seksi, dan Kepala Dusun/Dukuh.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Desa ini yaitu untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dan masyarakat dalam memanfaatkan Tanah Desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Desa ini yaitu pemanfaatan Tanah Desa meliputi :

- a. perlindungan;
- b. penggunaan; dan
- c. pelepasan.

BAB II PELINDUNGAN TANAH DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan fasilitasi perlindungan Tanah Desa yang menjadi kewenangannya atas hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten.
- (2) Fasilitasi perlindungan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Desa dalam rangka upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dari:
 - a. kerusakan;
 - b. kehilangan; dan/atau
 - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten, terhadap Tanah Desa yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten.

Pasal 5

- (1) Fasilitasi Pemerintah Desa untuk perlindungan Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. mengidentifikasi kondisi fisik Tanah Desa; dan/atau
 - b. memeriksa kondisi fisik Tanah Desa secara periodik.
- (2) Identifikasi dan/atau pemeriksaan kondisi fisik Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku tanah Desa.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya:
 - a. kerusakan;
 - b. kehilangan; dan/atau
 - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten, Pemerintah Desa melaporkan kepada Kasultanan dan/atau Kadipaten.

BAB III PENGUNAAN TANAH DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Tanah Desa digunakan untuk:

- a. Tanah Kas Desa;
- b. *Pelungguh*;
- c. *Pengarem-arem*; dan
- d. kepentingan umum.

Pasal 7

- (1) Tanah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terletak di wilayah Desa tersebut;
- (2) Tanah Desa yang terletak di wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan luasan, peruntukan dan letak bidang tanahnya oleh Pemerintah Desa.
- (3) Penjabaran luasan, peruntukan dan letak bidang Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua
Tanah Kas Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa dilakukan dengan cara:
 - a. digarap sendiri oleh Pemerintah Desa yang digunakan untuk:
 1. pertanian; atau
 2. non pertanian; dan/atau
 - b. disewakan.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Kasultanan atau Kadipaten, kecuali digunakan untuk pertanian yang digarap sendiri oleh Pemerintah Desa.
- (3) Untuk memperoleh izin Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Desa mengajukan permohonan yang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kasultanan dan/atau Kadipaten selaku pemberi izin.
- (4) Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 9

- (1) Hasil penggunaan Tanah Kas Desa merupakan pendapatan asli Desa.
- (2) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan Desa yang dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas Desa.

Paragraf 2
Penggunaan Tanah Kas Desa Dengan Cara
Digarap Sendiri Oleh Pemerintah Desa Untuk Pertanian

Pasal 10

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pertanian dengan cara digarap sendiri oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 dapat digarap:
 - a. secara mandiri oleh Pemerintah Desa;
 - b. oleh perseorangan yang berdomisili di Desa; atau
 - c. oleh kelompok Masyarakat desa.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pertanian secara mandiri oleh perseorangan yang berdomisili di Desa atau kelompok Masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilakukan dengan cara sewa tahunan dengan tidak mengubah fungsi tanah.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pertanian yang digarap oleh perseorangan atau kelompok masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b atau huruf c, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Kepala Desa mengumumkan kepada masyarakat Desa pada papan pengumuman di Balai Desa, yang memuat mengenai:
 1. luasan Tanah Kas Desa yang akan digunakan untuk pertanian;
 2. persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penggarap, yakni:
 - a) masyarakat yang bertempat tinggal di DIY, diutamakan warga Desa setempat; dan
 - b) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
 - b. warga Desa baik secara perseorangan atau kelompok mengajukan permohonan untuk menggarap Tanah Kas Desa yang digunakan untuk pertanian;
 - c. Kepala Desa bersama BPD melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. dalam hal verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditemukan ketidaklengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, Kepala Desa bersama BPD menolak permohonan;
 - e. dalam hal verifikasi permohonan telah memenuhi kelengkapan persyaratan Kepala Desa bersama BPD memberikan persetujuan nama-nama penggarap yang disesuaikan dengan luasan Tanah Kas Desa yang akan digunakan untuk pertanian;
 - f. persetujuan yang diberikan oleh Kepala Desa bersama BPD, diikuti dengan menetapkan:
 1. nama calon penggarap;
 2. luasan Tanah Kas Desa yang akan digarap; dan
 3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap dengan Pemerintah Desa.
 - g. nama calon penggarap, luasan Tanah Kas Desa yang akan digarap dan besaran pembagian hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf f diumumkan pada papan pengumuman di Balai Desa;
 - h. calon penggarap yang namanya diumumkan sebagai nama calon penggarap pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf g, membuat surat pernyataan tertulis ditujukan kepada Kepala Desa yang berisikan pernyataan mengenai kesediaannya untuk menggarap Tanah Kas Desa untuk pertanian, yang disampaikan ke Balai Desa;
 - i. Kepala Desa menetapkan:
 1. nama penggarap;
 2. luasan Tanah Kas Desa yang digarap; dan
 3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap dengan Pemerintah Desa, dengan Peraturan Kepala Desa, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf h.

Paragraf 3
Penggunaan Tanah Kas Desa Dengan Cara
Digarap Sendiri Oleh Pemerintah Desa Untuk Non Pertanian

Pasal 12

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa digarap sendiri oleh Pemerintah Desa yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2 antara lain digunakan untuk:
 - a. toko;
 - b. obyek wisata; dan/atau
 - c. restoran.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 13

Penggunaan Tanah Kas Desa yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. badan usaha milik desa;
- b. perseorangan yang berdomisili di Desa; atau
- c. kelompok masyarakat Desa.

Paragraf 4
Penggunaan Tanah Kas Desa Yang Disewakan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dapat menyewakan Tanah Kas Desa dalam rangka untuk:
 - a. menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan/atau
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- (2) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan kepada:
 - a. Instansi; dan/atau
 - b. Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pihak yang akan menyewa Tanah Kas Desa mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. proposal, yang paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan penggunaan Tanah Kas Desa;
 2. data tanah yang meliputi:
 - a) persil Tanah Kas Desa;
 - b) letak Tanah Kas Desa, yang berisikan nama pedukuhan, desa, kecamatan, dan kabupaten; dan
 - c) luas Tanah Kas Desa yang akan digunakan; dan
 3. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan Tanah Kas Desa;
 - b. identitas pihak yang akan menyewa Tanah Kas Desa dibuktikan dengan:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir bagi pemohon perorangan;

2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang bagi pemohon badan usaha/badan hukum swasta; atau
3. peraturan dasar tentang pembentukan Instansi pemerintahan;
- c. surat pernyataan dari pemohon, yang meliputi;
 1. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan menambah keluasan penggunaan Tanah Kas Desa yang diberikan izin;
 2. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihfungsikan sesuai dengan peruntukan;
 3. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihkan izin penggunaan Tanah Kas Desa kepada pihak lain;
- d. sketsa lokasi Tanah Kas Desa yang akan digunakan;
- e. sosialisasi kepada masyarakat Desa setempat; dan
- f. rekomendasi kesesuaian tata ruang.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa melakukan verifikasi terhadap permohonan tertulis kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan verifikasi permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dibantu oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa.
- (3) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. sekretaris Desa sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Perangkat Desa yang tugasnya pelaksana teknis sebagai anggota; dan
 - c. unsur staf sekretariat sebagai anggota.
- (4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa yang berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak lengkap, permohonan dikembalikan secara tertulis oleh Kepala Desa berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa.
- (2) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dinyatakan lengkap, Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa melakukan:
 - a. peninjauan lokasi objek Tanah Kas Desa yang akan disewakan; dan
 - b. verifikasi faktual atas dokumen yang disampaikan oleh pemohon, antara lain meliputi:
 1. mendatangi:
 - a) tempat tinggal pemohon bagi yang pemohonnya perorangan;
 - b) kantor pemohon bagi yang pemohonnya badan usaha/badan hukum swasta atau Instansi pemerintahan; dan
 2. bertemu dengan lembaga kemasyarakatan Desa yang telah menandatangani surat pernyataan dukungan terhadap sewa Tanah Kas Desa tersebut.
- (3) Berdasarkan hasil peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa membuat dan menandatangani berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual tersebut.
- (4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Desa.

- (5) Selain menyampaikan berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas Desa benar dalam penguasaan Pemerintah Desa dan tidak dalam keadaan sengketa.

Pasal 18

- (1) Instansi dan/atau Masyarakat yang akan menyewa Tanah Kas Desa, harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa terhadap maksud dan tujuan menyewa Tanah Kas Desa.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Desa bersama BPD.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa bersama BPD membahas permohonan tertulis sewa Tanah Kas Desa dari pemohon, yang didasarkan pada:
 - a. berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual yang merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim Tanah Kas Desa; dan
 - b. surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh tim Tanah Kas Desa yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas Desa benar dalam penguasaan Pemerintah Desa dan tidak dalam keadaan sengketa.
- (2) Pembahasan permohonan tertulis sewa Tanah Kas Desa dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Desa dan BPD dengan mengundang pemohon untuk hadir dalam pembahasan tersebut guna menyepakati besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Desa.
- (3) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Desa, Kepala Desa dan/atau BPD menolak permohonan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Desa serta Kepala Desa dan/atau BPD menyetujui permohonan yang bersangkutan, selanjutnya Kepala Desa menerbitkan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak penyewa;
 - b. lokasi dan luasan Tanah Kas Desa yang disewakan;
 - c. jangka waktu sewa;
 - d. besaran sewa; dan
 - e. tata cara pembayaran sewa.
- (6) Kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi kepada camat dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan permohonan sewa Tanah Kas Desa dari Instansi atau Masyarakat.
- (7) Rekomendasi dari camat digunakan oleh Kepala Desa untuk pemenuhan syarat administrasi pengajuan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin sewa Tanah Kas Desa dari Pemerintah Desa kepada Kasultanan atau Kadipaten dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Desa.

Pasal 21

- (1) Penggunaan Tanah Kas Desa yang disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diperpanjang jangka waktu sewanya.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan perpanjangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perjanjian sewa berakhir.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pihak penyewa Tanah Kas Desa:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. pailit, ahli waris bagi orang perorangan atau pengurus bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta harus melaporkan kepada Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pihak penyewa Tanah Kas Desa meninggal dunia bagi orang perorangan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Kepala Desa melaporkan kepada Kasultanan atau Kadipaten melalui Dinas dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 23

Ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Desa.

Bagian Ketiga *Pelungguh*

Pasal 24

- (1) Penggunaan Tanah Desa untuk *pelungguh* diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. sekretaris Desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - c. kepala seksi;
 - d. kepala urusan; dan
 - e. kepala dusun atau yang disebut dengan nama lain.
- (2) Penggunaan Tanah Desa untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) dari luasan Tanah Desa.

Pasal 25

Penggunaan tanah desa untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 26

Penggunaan Tanah Desa untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) *Pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat dengan ketentuan:
 - a. subjek yang melakukan penyewaan adalah Pemerintah Desa;
 - b. pendapatan yang diperoleh dari penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi antara Pemerintah Desa dan pemegang *pelungguh* sebagai penghasilan tambahan;
 - c. besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan penerima *pelungguh* sebesar ...% (..... perseratus) dan bagi Pemerintah Desa ...% (..... perseratus); dan
 - d. bagian Pemerintah Desa disetorkan dalam rekening kas Desa dan bagian pemegang *pelungguh* diserahkan kepada yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan *pelungguh* yang disewakan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Desa.

Pasal 28

- (1) *Pelungguh* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Desa.
- (2) *Pelungguh* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Desa.

Bagian Keempat *Pengarem-arem*

Pasal 29

- (1) Penggunaan Tanah Desa untuk *pengarem-arem* diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. sekretaris Desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - c. kepala seksi;
 - d. kepala urusan; dan
 - e. kepala dusun atau yang disebut dengan nama lain, yang diberhentikan secara hormat karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.
- (2) Penggunaan Tanah Desa untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari luasan Tanah Desa.

Pasal 30

Penggunaan tanah desa untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 31

Penggunaan Tanah Desa untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 32

Pengarem-arem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat disewakan atau digunakan kepada Instansi atau Masyarakat.

Pasal 33

Ketentuan mengenai *pelungguh* yang dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap *pengarem-arem* yang dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat.

Pasal 34

- (1) *Pengarem-arem* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Desa.
- (2) *Pengarem-arem* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Desa.

BAB IV PELEPASAN

Pasal 35

Tanah Desa adalah tanah hak Milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Desa berdasarkan hak *anggaduh*, dapat dilepas untuk kepentingan umum.

Pasal 36

Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENILAIAN PUBLIK

Pasal 37

- (1) Besaran sewa Tanah Kas Desa berdasarkan hasil penilaian dari Penilai, kecuali Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa.
- (2) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewa Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan.

Pasal 38

Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Desa;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) proposal;
 - 2) surat pernyataan; dan
 - 3) besaran keringanan.
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Desa melakukan penilaian;
- d. berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Desa dapat menerima atau menolak permohonan;
- e. dalam hal permohonan diterima, Kepala Desa menyampaikan surat permohonan persetujuan keringanan biaya sewa kepada BPD;

- f. BPD menerbitkan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. dalam hal BPD memberikan persetujuan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai keringanan biaya sewa; dan
- h. dalam hal BPD menolak, Kepala Desa menyampaikan surat pengembalian kepada pemohon.

Pasal 39

Besaran keringanan biaya sewa tanah desa paling tinggi sejumlah ... % (perseratus) dari nilai yang telah ditetapkan Penilai Publik.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Desa (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maka dapat dilakukan perubahan terhadap peraturan ini.

Pasal 42

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA ... (Nama Desa)
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) KABUPATEN (Nama Kabupaten) TAHUN ...
NOMOR ...

LAMPIRAN I
 PERATURAN DESA ... (Nama Desa)
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMANFAATAN TANAH DESA ... (Nama Desa)

TANAH DESA

NO.	LETAK OBJEK TANAH	TANAH KAS DESA				PELUNGGUH				PENGAREM-AREM				KETERANGAN
		Persil / Klas	Luas (m ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Persil / Klas	Luas (m ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Persil / Klas	Luas (m ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.													
2.	Dst													
JUMLAH														

Desa (nama Desa), Kecamatan (nama Kecamatan), Kabupaten (nama Kabupaten),-.....-2019

Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan Permusyawaratan Desa,

Kepala Desa,

1. Ketua 1.
 2. Anggota 2.....
 3. Dst Dst 3.....

.....

Keterangan:

- Kolom 2 : berisikan nama pedukuhan, RT dan RW dari letak dari objek tanah yang bersangkutan.
- Kolom 3, 7, dan 11, : berisikan nomor persil dan klas dari objek tanah yang bersangkutan.
- Kolom 4, 8, dan 12 : berisikan luasan dari objek tanah yang bersangkutan.

4. Kolom 5, 9, dan 13 : berisikan kondisi fisik dari objek tanah yang bersangkutan, misalnya: objek tanah dikuasai Pemerintah Desa yang di atasnya terdapat bangunan, objek tanah dikuasai oleh pihak lain atau objek tanah berupa sawah.
5. Kolom 6, 10, dan 14 : berisikan objek tanah yang bersangkutan dimuat dalam Peta Desa (*Legger* Desa) atau sertipikat.
6. Kolom 15 : berisikan terjadinya peristiwa atau perbuatan hukum di atas objek tanah yang bersangkutan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan pihak lain baik di waktu yang lampau maupun pada saat ini yang dibuktikan dengan saksi-saksi dan/atau dokumen-dokumen pendukungnya.

LAMPIRAN II
 PERATURAN DESA ... (Nama Desa)
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMANFAATAN TANAH DESA ... (Nama Desa)

TANAH KAS DESA

NO.	LETAK OBJEK TANAH	TANAH KAS DESA				KETERANGAN
		Persil / Klas	Luas (m ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	
1	2	3	4	5	6	7
1.					
2.	Dst					
	JUMLAH					

Desa (nama Desa), Kecamatan (nama Kecamatan), Kabupaten (nama Kabupaten),-.....-2019

Dibuat dan ditetapkan bersama,

	Badan Permusyawaratan Desa,	Kepala Desa,
1.	Ketua 1.	
2.	Anggota 2,.....	
3. Dst	dst 3.....

Keterangan:

- 1. Kolom 2 : berisikan nama pedukuhan, RT dan RW dari letak dari objek tanah yang bersangkutan.
- 2. Kolom 3 : berisikan nomor persil dan klas dari objek tanah yang bersangkutan.
- 3. Kolom 4 : berisikan luasan dari objek tanah yang bersangkutan.
- 4. Kolom 5 : berisikan kondisi fisik dari objek tanah yang bersangkutan, misalnya: objek tanah dikuasai Pemerintah Desa yang di atasnya terdapat bangunan, objek tanah dikuasai oleh pihak lain atau objek tanah berupa sawah.

- 5. Kolom 6 : berisikan objek tanah yang bersangkutan dimuat dalam Peta Desa (*Legger* Desa) atau sertipikat.
- 6. Kolom 7 : berisikan terjadinya peristiwa atau perbuatan hukum di atas objek tanah yang bersangkutan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan pihak lain baik diwaktu yang lampau maupun pada saat ini yang dibuktikan dengan saksi-saksi dan/atau dokumen-dokumen pendukungnya.

LAMPIRAN III
 PERATURAN DESA ... (Nama Desa)
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMANFAATAN TANAH DESA ... (Nama Desa)

PELUNGGUH

NO.	JABATAN	Letak Objek Tanah	Persil / Klas	Luas (m ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Masa Dalam Jabatan		KETERANGAN
							Terhitung Mulai Tanggal	Berakhir Pada Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.								
2.	Dst								
.	JUMLAH								

Desa (nama Desa), Kecamatan (nama Kecamatan), Kabupaten (nama Kabupaten),-.....-2019

Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan Permusyawaratan Desa,

Kepala Desa,

- | | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 1. | Ketua | 1. | |
| 2. | Anggota | | 2. |
| 3. Dst | dst | 3. | |

.....

Keterangan:

1. Kolom 2 : berisikan nama Jabatan dalam Pemerintah Desa.
2. Kolom 3 : berisikan nama pedukuhan, RT dan RW dari letak dari objek tanah yang bersangkutan.
3. Kolom 4 : berisikan nomor persil dan klas dari objek tanah yang bersangkutan.
4. Kolom 5 : berisikan luasan dari objek tanah yang bersangkutan.

5. Kolom 6 : berisikan kondisi fisik dari objek tanah yang bersangkutan, misalnya: objek tanah dikuasai Pemerintah Desa yang di atasnya terdapat bangunan, objek tanah dikuasai oleh pihak lain atau objek tanah berupa sawah.
6. Kolom 7 : berisikan objek tanah yang bersangkutan dimuat dalam Peta Desa (*Legger* Desa) atau sertipikat.
7. Kolom 8 : berisikan tanggal definitif duduk dalam jabatan di Pemerintah Desa.
8. Kolom 9 : berisikan tanggal definitif berakhirnya jabatan di Pemerintah Desa.
9. Kolom 10 : berisikan terjadinya peristiwa atau perbuatan hukum di atas objek tanah yang bersangkutan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan pihak lain baik di waktu yang lampau maupun pada saat ini yang dibuktikan dengan saksi-saksi dan/atau dokumen-dokumen pendukungnya.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DESA ... (Nama Desa)
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMANFAATAN TANAH DESA ... (Nama Desa)

PENGAREM-AREM

NO.	PURNA TUGAS DALAM JABATAN	Letak Objek Tanah	Persil / Klas	Luas (m ²)	Kondisi Fisik	Tanda Bukti	Penggunaan Tanah		KETERANGAN
							Terhitung Mulai Tanggal	Berakhir Pada Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.								
2.	Dst								
.	JUMLAH								

Desa (nama Desa), Kecamatan (nama Kecamatan), Kabupaten (nama Kabupaten),-.....-2019

Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan Permusyawaratan Desa,

Kepala Desa,

1.
2.
3. Dst

Ketua 1.
 Anggota 2.
 dst 3.

.....

Keterangan:

1. Kolom 2 : berisikan nama Jabatan dalam Purna Tugas di Pemerintah Desa.
2. Kolom 3 : berisikan nama pedukuhan, RT dan RW dari letak dari objek tanah yang bersangkutan.
3. Kolom 4 : berisikan nomor persil dan klas dari objek tanah yang bersangkutan.
4. Kolom 5 : berisikan luasan dari objek tanah yang bersangkutan.

5. Kolom 6 : berisikan kondisi fisik dari objek tanah yang bersangkutan, misalnya: objek tanah dikuasai Pemerintah Desa yang di atasnya terdapat bangunan, objek tanah dikuasai oleh pihak lain atau objek tanah berupa sawah.
6. Kolom 7 : berisikan objek tanah yang bersangkutan dimuat dalam Peta Desa (*Legger* Desa) atau sertipikat.
7. Kolom 8 : berisikan tanggal dimulainya menggunakan tanah untuk Pengarem-arem berdasarkan tanggal definitif Purna Tugas di Pemerintah Desa.
8. Kolom 9 : berisikan tanggal berakhirnya penggunaan tanah Pengarem-arem.
9. Kolom 10 : berisikan terjadinya peristiwa atau perbuatan hukum di atas objek tanah yang bersangkutan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan pihak lain baik di waktu yang lampau maupun pada saat ini yang dibuktikan dengan saksi-saksi dan/atau dokumen-dokumen pendukungnya.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA
TENTANG PEMANFAATAN TANAH DESA

SURAT PERNYATAAN

KOP PEMERINTAH DESA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Tanah Desa, Kecamatan, Kabupaten.....seluas kurang lebih,
dengan rincian :
 - a. Tanah Kas Desa seluas
 - b. Tanah Pelungguh seluas
 - c. Tanah Pengarem-arem seluas
2. Tanah Desa yang dilepaskan seluas (jika ada)
3. Tanah Desa yang berada diluar Desa seluas (jika ada)

Demikian Surat Pernyataan ini sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Yogyakarta, 2019

Yang Menyatakan
Kepala Desa

(Cap Kepala Desa)
Nama Kepala Desa

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001